

SKRIPSI

Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata (Studi Kasus Pariwisata Bahari dan Permandian So'do di Kab. Mamuju)

**PURWO AGUNG WICAKSONO
E 211 06 604**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

2013

ABSTRAK

Purwo Agung Wicaksono (E 211 06 604), Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Pariwisata Bahari dan Permandian So'do di Kab. Mamuju), Dibimbing oleh Suratman dan Alwi.

Wisata atau *Tourism* sudah merupakan salah satu *trend* yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Wisata tak lagi dipandang sebagai suatu yang menjadi milik kelompok masyarakat yang mapan saja, tapi juga bagi semua kalangan masyarakat; meski dalam apresiasi dan *budget* yang berbeda. Seperti yang saat ini menjadi trend topik masyarakat Sulawesi Barat (Kab. Mamuju) sebagai sarana pariwisata yang menjadi salah satu pendukung positif terhadap pengembangan obyek-obyek pariwisata, yang mana dalam pengembangan obyek-obyek pariwisatanya saat ini adalah pengembangan Obyek Pariwisata Bahari dan Wisata Alam. Obyek Pariwisata Bahari yang diberi nama Pulau Karampuang dan Obyek Wisata Alam yang dikenal dengan nama Permandian So'do.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Unit analisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, artinya data diperoleh dari dokumen berupa jawaban atau keterangan bukan berupa angka-angka. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju.

Hasil penelitian terhadap Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju telah berjalan cukup efektif melihat dari status tanah yang ada di obyek wisata alam (permandian so'do) telah mencapai kesepakatan meskipun obyek wisata bahari masih dalam proses penyelesaian untuk mencapai kesepakatan dengan warga sekitar obyek wisata bahari (pulau karampuang).

UNIVERSITYHASANUDDIN
FACULTY OF SOCIALANDPOLITICAL SCIENCE
SCIENCEDEPARTMENT OFADMINISTRATION
GRADUATEPROGRAM

ABSTRACT

**PurwoAgung Wicaksono(E 21106 604),
ProgramPlanningandManagementEffectivenessTourism inMamuju(Case Study
andBathSo'doMarine Tourisminthe District.Mamuju),Supervised
bySuratmanandAlwi.**

Travel or Tourism already is one trend that is part of the lifestyle of modern society. Tourism is no longer viewed as a group of people who belong to an established course, but also to all the community; despite the appreciation and different budget. As the trend is currently the topic of West Sulawesi (Kab.Mamuju) as a means of tourism which is one of positive support to the development of tourism objects, which is in the development of tourism objects at the moment is the development of Marine Tourism Object and Nature. Marine Tourism Object named Karampuang and Object Island Nature known as bath So'do.

The objectives of this study is to find out How to Program Effectiveness Planning and Management of Tourism in Mamuju. The method used is descriptive qualitative. The unit of analysis techniques using qualitative data analysis, meaning that the data obtained in the form of documents or information not answer in the form of numbers. The data collected consist of primary data and secondary data. By using descriptive qualitative method using the techniques of data collection through interviews with informants who are considered potentially to provide information about how the Program Planning and Management Effectiveness Tourism in Mamuju.

The results of the Effectiveness of Program Planning and Management of Tourism in Mamuju can be concluded that the Program Planning and Management of Tourism in Mamuju has been quite effective notice of the status of the land in natural attractions (washing so'do) have reached an agreement even though marine tourism is still in the process of finalizing the deal with the local people of nautical tourism (Karampuang island).

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : PURWO AGUNG WICAKSONO

NIM : E211 06 604

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata (Studi Kasus Pariwisata Bahari dan Permandian So’do di Kab.Mamuju)”** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, Agustus 2013

PURWO AGUNG WICAKSONO
E 211 06 604



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : PURWO AGUNG WICAKSONO

NPM : E211 06 604

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

**Judul EFEKTIVITAS PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN OBYEK
WISATA (STUDI KASUS PARIWISATA BAHARI DAN PERMANDIAN
SO'DO DI KAB. MAMUJU)**

Telah diperiksa oleh Ketua Program Sarjana dan Pembimbing serta di
nyatakan layak untuk diajukan ke sidang Skripsi Program Sarjana Jurusan
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2013

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suratman, M.Si
NIP.19570715 198403 1 001

Dr. Alwi, M.Si
NIP.19631015198903 1 006

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Prof. Dr. Sangkala, MA.
Nip. 19631111 199103 1 002

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : PURWO AGUNG WICAKSONO
NIM : E211 06 604
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : **EFEKTIVITAS PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN
OBYEK WISATA (STUDI KASUS PARIWISATA BAHARI DAN
PERMANDIAN SO'DO DI KAB. MAMUJU)**

Telah dipertahankan dihadapan Penguji Ujian Skripsi Program Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 14 agustus 2013.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang	: Prof. Dr. Suratman,M.Si	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Alwi, M.Si	(.....)
Anggota	: Drs. La Tamba, M.Si	(.....)
	Drs. Ali Fauzy Ely, M.Si	(.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, karunia, dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Setiap tarikan nafas dan detak jantung penulis adalah anugerah dari-Nya. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur di berikan-Nya sehingga skripsi dengan judul **Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata (Studi Kasus Pariwisata Bahari dan Permandian So'do di Kab.Mamuju)** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, guna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Salawat dan Salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya suri teladan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap umat yang tetap istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir Zaman.

Sebagai seorang hamba yang dhaif dengan kemampuan yang terbatas, tidak sedikit kendala yang dialami oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat pertolongan dari-Nya dan bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kendala tersebut dapat diatasi. Olehnya itu, melalui karya ini, teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Orangtua penulis. Ayahanda **H. Muh. Samsudin** dan Ibunda tercinta **Hj. Nunuk Handayati**, yang telah melahirkan mengasuh mendidik dan memberikan perhatian serta kasih sayang sejak lahir hingga masih berada sekarang di dunia ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada Bulikku **Ninik Handayani**, untuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Dan ucapan syukur dan terima kasih atas doa, dukungan, dorongan dan bantuannya selama ini, semoga ALLAH SWT senantiasa selalu melindungi mereka

serta memberikan umur yang panjang, sehat wal afiyat dan kebahagiaan selalu menghiasi kehidupan mereka, Aamiin.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak **Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi** sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, pimpinlah Unhas menjadi Universitas terbesar dan bermoral.
2. Bapak **Prof.Dr.Hamka Naping, M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
3. Bapak **Prof. Dr. Sangkala, MA** sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
4. Ibu **Dr. Hamsinah, M,Si** sebagai Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi,
5. Bapak **Drs. Nurdin Nara, M.Si** sebagai Penasehat Akademik Penulis selama kuliah. Terima Kasih atas bimbingan dan ilmunya untuk kemajuan penulis.
6. **Bapak Prof. Dr. Suratman, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Alwi, M.Si.** selaku pembimbing II Terima kasih atas waktu, ilmu, tenaga, nasehat serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi atas ilmu yang bermanfaat buat penulis serta seluruh staf pegawai Jurusan Ilmu Administrasi (**K"Rini, K" Amra, K" Achi", dan Pak Lili**) atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi.
8. Seluruh Pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamujukhususnya Ibu **Dra. Hj. Hapsah Wahid**, Ibu **Hj. Warliah Hamid M,Pd**, dan Bapak **Arianto Apatas** waktu yang diberikan kepada penulis untuk wawancara serta memberikan data-data yang diperlukan untuk pembuatan skripsi penulis.
9. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, **Mba Dwi, Mba Dian (otonk) dan Aco'**serta adikku **Bagus**. Terima kasih atas segala nasehat, bantuan serta dukungan yang tak pernah terhenti bagi penulis.

10. Spesial untuk **Shepta Lyss** yang selalu memberikan support dan motivasi, waktu, tenaga dan kasih sayang serta perhatian yang tak pernah berujung bagi penulis, sehingga penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasannya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. My Best Friends "**Hipermaju**", **K' Kijul, K' Imet, Acca' kele, Accale', Jfs (juan), Agus iki, Badi, Appi, Andi cippe', Edwin, Ewax, Rajid, Rass,** Terima kasih atas do'a dan motivasi kalian selama ini.
12. Teman-Teman seperjuangan di Universitas Hasanuddin 06 **Yuda, Taqwin, Iqbal, Rahmat, Pute', Stenny, Madhan, Emy, Icha beccus, Fery saiye, Imam Muchlis, Syamsul fais, Novry, Ringgo**, dan lain-lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Sahabat-sahabatku **Angga, Bang Wawan, Alam**, serta teman-teman SMA N 3 Ponorogo yang tak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas keceriaan dan dukungannya selama ini.

Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala kebaikan dan jasa-jasanya. Semoga ALLAH SWT melimpahkan Rahmat dan Karunianya pada kita semua, Amin. Akhir kata, penulis meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada di skripsi ini, karena bagaimanapun penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf serta kesalahan.

Jazakillah Khairan Katsiran
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, Agustus 2013
Penulis

Purwo Agung Wicaksono

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1.Latar Belakang.....	1
I.2..Rumusan Masalah.....	7
I.3.Tujuan Penelitian.....	7
I.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1.Pengertian Efektivitas.....	9
II.2.Ukuran Efektivitas.....	11
II.3.Pengertian Program.....	15
II.4.Pengertian Penataan	17
II.5.Pengertian Pengelolaan.....	18
II.6.Pengertian Wisata	19
II.7.Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
III.1.Pendekatan Penelitian	31
III.2.Lokasi Penelitian.....	31

III.3. Tipe dan Dasar Penelitian	31
III.4. Teknik Pengumpulan Data	32
III.5. Jenis dan Sumber Data	32
III.6. Narasumber atau Informan	33
III.7. Analisis Data.....	33
III.8. Fokus Penelitian.....	34
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	35
IV.1. Gambaran Umum Lokasi.....	35
IV.2. Gambaran Demografi.....	35
IV.3. Pengembangan dan Konsep Pembangunan Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata	36
IV.3.1. Pengembangan Obyek Wisata.....	36
IV.3.2. Konsep Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
V.1. Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata.....	44
A. Pencapaian Tujuan.....	44
B. Integrasi.....	62
C. Adaptasi.....	68
BAB VI PENUTUP.....	73
VI.1. Kesimpulan.....	73
VI.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Pembangunan penataan dan pengelolaan obyek wisata di kabupaten mamuju dengan dana yang di dapat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Mamuj..... 43
2. Pencapaian Sasaran/Tujuan dari Pelaksanaan Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju 56
3. Tabel Efektivitas program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kab. Mamuju 71

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Wisata atau *tourism* sudah merupakan salah satu *trend* yang menjadibagian dari gaya hidup masyarakat modern. Wisata tak lagi dipandang sebagai suatu yang menjadi milik kelompok masyarakat yang mapan saja, tapi juga bagi semua kalangan masyarakat; meski dalam apresiasi dan *budget* yang berbeda. Seperti yang saat ini menjadi trend topik masyarakat Sulawesi Barat (Kab.Mamuju) sebagai sarana pariwisata yang menjadi salah satu pendukung positif terhadap pengembangan obyek-obyek pariwisata, yang mana dalam pengembangan obyek-obyek pariwisatanya saat ini adalah pengembangan obyek pariwisata bahari dan wisata alam. Obyek pariwisata bahari yang diberi nama Pulau Karampuang dan obyek wisata alam yang dikenal dengan nama Pemandian So'do.

Perlu diketahui kedua obyek pariwisata ini merupakan obyek pariwisata yang di prioritaskan sebagai obyek unggulan Kab.Mamuju untuk dijadikan prasarana pendukung dalam pengembangan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, meskipun di Kabupaten Mamuju terdapat beberapa obyek pariwisata lainnya seperti : Pantai Lombang-lombang, Air Terjun Tamasapi, Pemandian Air Panas Padang Panga', Anjoro Pitu, Air Terjun Lebani, Pulau Bakengkeng, Bone Tangnga, Pantai Rangas, Air

Terjun Pano/Sondoang, Pasir Putih Tanjung Ngalo, Air Panas Pangsiangang, Air Terjun Le'beng. Sebagaimana pemerintah gunakan semenjak dibentuknya Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober Tahun 2004. Salah satu strategi yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menuju Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah Pembangunan Kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi dengan konsep Kota Wisata.

Menurut kamus penataan ruang, penataan adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan yang berasaskan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Edisi I, 1997). Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penataan ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 ayat 5).

Perlu sejenak diketahui dalam wilayah Kabupaten Mamuju yang merupakan salah satu dari lima Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yang akan menjadi prioritas pembangunannya adalah pengembangan obyek pariwisata. Namun sampai saat ini setelah mendengar beberapa informan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju, yang menjadi permasalahan pokok sehingga dari tahun-ketahun obyek wisata tidak dapat dikelola dengan baik dikarenakan beberapa

masalah diantaranya : Belum jelasnya status lahan yang menjadi obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Mamuju baik wisata bahari maupun wisata alamnya, Belum efektifnya pemberian dana pemeliharaan dari Pemerintah setempat terhadap prasarana pendukung obyek wisata, kurangnya prasarana pendukung obyek wisata dikarenakan banyak yang telah rusak, Pemerintah setempat belum pernah memikirkan atau merencanakan pengembangan nilai-nilai Budaya yang dirangkai dalam satu pengembangan sarana pendukung obyek wisata.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang realistis dan logis, mengingat dampak positif yang ditimbulkan diantaranya semakin meluasnya kesempatan usaha, baik hotel, biro perjalanan, toko cinderamata serta meningkatnya pendapat masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan ketertiban walaupun sebenarnya “juga” ada hal-hal yang berdampak negatif.

Beberapa kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata diantaranya pembinaan dan pengembangan kepariwisataan seperti: mengencangkan promosi pariwisata, meyiapkan dan meningkatkan mutu pelayan dan mutu produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk baru terutama di wilayah timur Indonesia, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang kepariwisataan dan melaksanakan kampanye nasional yang berkesinambungan (Hari Karyono ; 1997 ; 90).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Yoeti**, (1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "tour".

Melihat beberapa permasalahan di atas, pokok permasalahan yang kurang dipahami oleh Pemerintah Daerah adalah dalam melakukan penataan obyek pariwisata adalah melakukan konsep penataan yang bersifat global artinya tidak membedakan obyek pariwisata yang ada diseluruh Indonesia mengakibatkan penataan tersebut bersifat tiruan atau monoton. Sehingga tidak terlihat Ciri Khas masing-masing dalam obyek penataan pariwisatanya.

Sebagaimana dalam teori penataan wilayah yang seharusnya dapat mempercepat pembangunan dimana pembangunan yang ada adalah konsep pembangunan kawasan dengan melihat prasarana pendukung yang tepat bukan lebih kepada pemberian prasarana berdasarkan sifat kota. Misalnya dalam bentuk penataan itu lebih kepada penataan kota modern tanpa mempertimbangkan sarana lingkungan wilayah masing-masing daerah. Sebagaimana Kabupaten Mamuju yang ditinjau dari segi struktur geografis wilayahnya sebagai wilayah pesisir

pantai maka konsep penataannya harus tepat sasaran atau penataanya disesuaikan dengan sifat geografis wilayah tersebut.

Menurut Mohammad Ali dalam bukunya *pendidikan untuk pembangunan nasional menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi* mendefinisikan pembangunan yaitu segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia.

Adapun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam Konsep Pembangunan Kota Wisata 2013 adalah sebagai berikut :

- ❖ Untuk Pemandian Alam So'do :
 - ✓ Memberikan biaya pembebasan lahan terhadap obyek wisata Pemandian Alam So'do
 - ✓ Pemerintah Daerah menambah biaya pemeliharaan fasilitas obyek wisata
 - ✓ Penambahan jumlah anggaran terhadap pembangunan fasilitas pendukung diantaranya :
 - Sentra penjualan agribisnis berupa buah durian dan langsung
 - Pembangunan pasar kerajinan
 - Pembangunan sarana parkir untuk para pengunjung
 - Pembangunan jembatan gantung
 - Pembangunan sarana ibadah berupa mushollah
- ❖ Untuk Pulau Karampuang (Bahari) :
 - ✓ Memberikan biaya pembebasan lahan terhadap obyek wisata pulau karampuang (Bahari)
 - ✓ Pemerintah Daerah menambah biaya pemeliharaan fasilitas obyek wisata
 - ✓ Penambahan pembangunan fasilitas sarana obyek wisata berupa :
 - Speed Boat yang sifatnya di sewakan
 - Banana Boat
 - Ruang serba guna sanggar seni (pertunjukan pagelaran Seni Budaya Kabupaten Mamuju)

- Pembangunan Villa dan Pasar Keterampilan hasil kerajinan pantai
- Pelataran pantai yang ditimbun dengan pasir putih

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka sebagai alasan pokok penulis memilih judul “Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata (Studi kasus pariwisata bahari dan permandian alam so’dodi Kabupaten Mamuju)” sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pembangunan Nasional yang telah dilaksanakan dalam usaha mengisi Kemerdekaan adalah pembangunan Indonesia seutuhnya yang berarti tujuannya adalah masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 maka program penataan dan pengelolaan obyek wisata perlu ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah terutama dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya.
2. Guna tersedianya dana yang cukup dan dalam waktu yang tepat, maka usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas program penataan dan pengelolaan obyek wisata perlu mendapat perhatian khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
3. Di kabupaten mamuju banyak terdapat obyek-obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, untuk itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan penataannya, dan pengelolaan obyek wisata tersebut.

I.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju ?”

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju.

I.4. Manfaat Penelitian

Setelah selesai penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kami sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

a. Manfaat Praktis :

1. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam penataan dan pengelolaan obyek wisata.
2. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya menjadi bahan perbandingan dengan daerah-daerah lainnya.

b. Manfaat Akademik :

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara pada

khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini.

2. Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi sumbangan kepada masyarakat dan pengelola pariwisata untuk menyusun perencanaan pembangunan kepariwisataan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa

memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya". Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi), daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" (Kurniawan, 2005:109). Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya". Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan

dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

II.2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam artipentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapandalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan targetkongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985;53), yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju.

II.3. Pengertian Program

Program adalah kata, daftar terinci mengenai acara, usaha atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan.

(<http://server1.myservermatrix.com>)

Rencana pembangunan nasional dan penjabarannya dalam bentuk berbagai program pembangunan pada umumnya direalisasikan melalui beraneka ragam proyek pembangunan sebagai mata rantai amat penting arti dan peranannya dalam keseluruhan mata rantai penyelenggaraan pembangunan nasional.

Mutlak perlu bukan saja karena pengelolaan proyek pembangunan merupakan salah satu wahana untuk menjadikan rencana dan program yang telah ditetapkan menjadi kenyataan, akan tetapi karena negara-negara yang sedang berkembang menghadapi permasalahan yang tidak sedikit jenis dan ragamnya dalam mengelola proyek-proyek pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai program menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagaan menjelaskan :

Berbagai kegiatan untuk merealisasikan rencana dan program pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa pada umumnya diproyeksikan karena cara itulah yang sering dipandang sebagai upaya paling efektif untuk realisasi rencana dan program yang telah disusun dan ditetapkan.

Selanjutnya salah seorang yang cukup menaruh minat terhadap implementasi kebijaksanaan (program) mengemukakan pendapat bahwa : Implementasi program merupakan konsep yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dapat dilakukan, yang merupakan aktivitas yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam dampak.

Dari pengertian tersebut diatas terlihat bahwa didalam usaha pengembangan kebijaksanaan atau program harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian pula sasaran yang akan dicapai.

Para perumus kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional para perencana pembangunan dan para anggota elite administratif dalam suatu negara/daerah yang sedang membangun kiranya menyadari benar bahwa pengelolaan proyek pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijaksanaan pembangunan yang telah dirumuskan secara tepat, rencana yang telah tersusun dengan baik dan program yang telah terjabarkan dengan rapi akan merupakan dokumen-dokumen yang baik

pula dalam melaksanakan program pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berhasil tidaknya suatu proses Implementasi program atau kebijaksanaan dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai dengan melibatkan berbagai unsur yang saling terkait.

II.4. Pengertian Penataan

Menurut Rustiadi et al.(2009) ruang terdiri dari lahan dan atmosfer. Lahan dapat dibedakan lagi menjadi tanah dan tata air. Ruang merupakan bagian dari alam yang dapat pula menimbulkan pertentangan jika tidak diatur dan direncanakan dengan baik dalam penggunaan dan pengembangannya. Oleh sebab itulah perlu dilakukan penataan ruang sehingga menjadi hak dan kewajiban setiap individu dalam upaya menciptakan pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tujuan bersama.

Dikatakan pula oleh Sugandhy (1999)dalam Aliati (2007)bahwa didalam penataan ruang perlu juga dipertimbangkan adanya ruang-ruang yang mempunyai fungsi lindung dalam kaitannya terhadap keseimbangan tata udara, tata air, konservasi flora dan fauna serta kesatuan ekologi. Proses penataan ruang secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu perencanaan, implementasi dan pengendalian.Menurut Permana (2004) penataan ruang adalah suatu proses yang mencakup perencanaan tata ruang (penyusunan rencana tata ruang wilayah), pemanfaatan ruang melalui serangkaian program pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dan pengendalian pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang.

Rustiadi et al.(2009) menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan sebagai: (1) optimasi pemanfaatan sumberdaya (mobilisasi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya) guna terpenuhinya efisiensi dan produktifitas, (2) alat dan wujud distribusi sumberdaya guna terpenuhinya prinsip pemerataan, keberimbangan dan keadilan, serta (3) menjaga keberlanjutan pembangunan. Dikatakan selanjutnya, sebagai suatu proses terdapat setidaknya dua unsur penting dalam penataan ruang, pertama menyangkut unsur kelembagaan/institusional penataan ruang, dan kedua, menyangkut proses fisik ruang.

II.5. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan –perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda- beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan.

Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi- definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut (Harsoyo,1977:121)

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,pengorganisasian,penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

II.6. Pengertian Wisata

1. Pariwisata

World Tourism Organization(WTO) mengembangkan definisi-definisimendasar tentang konsep-konsep kunci yang terkait dengan kepariwisataan yaitu:

- a. Pariwisata : merupakan aktivitas perjalanan dan tinggal dari orang-orang menuju ke luar lingkungan mereka yang biasa selama tidak lebihdari setahun untuk bersenang-senang, bisnis, atau tujuan lainnya
- b. Wisatawan: merupakan pengunjung yang menginap sedikitnya selamasatu malam pada fasilitas akomodasi di lokasi yang dikunjungi

- c. Ekskursionis : pengunjung yang tidak menginap pada fasilitasakomodasi di lokasi yang dikunjungi.
- d. Pengunjung : setiap orang melakukan perjalanan ke luar lingkunganmereka yang biasa selama kurang dari 12 bulan secara berturut-turutyang tujuan kunjungannya tidak untuk bekerja pada tempat yangdikunjungi.

Pariwisata sebagai segalakegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Dalam pengertian tersebut wisatawan dimaknai sebagai orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya.(Soekadijo 2000 : 2)

Sementara Burkart dan Medlik (1987) menyebutkan pariwisata sebagai perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek, ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, termasuk kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat itu.

Bila merujuk pada Undang-Undang No 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta unsur-unsur yang terkait di bidang itu.

Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Sebaliknya, yang dimaksud daya tarik wisata bisa berhubungan pada budaya atau

lingkungan alam yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Lebih lanjut disebutkan bahwa kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Dengan memperhatikan pengertian pariwisata seperti uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan gejala sosial yang sangat kompleks, menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek seperti sosiologis, budaya, politik, psikologis, ekonomis, dan ekologis. Pengembangan pariwisata di suatu daerah tentu memiliki tujuan-tujuan khusus dalam rangka meningkatkan tingkat kehidupan di daerah tersebut. Dalam UU No 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, tujuan pengembangan kepariwisataan disebutkan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha serta memperluas lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Dengan perspektif sistem, mengkaji pariwisata sebagai suatu mobilitas spasial. Dalam model mobilitas spasial tersebut Soekadijo menetapkan sejumlah variabel yang menjadi determinan mobilitas spasial

yang 25 daya tarik. Yang termasuk dalam daya tarik khusus ini misalnya taman hiburan, sirkus, pusat perbelanjaan, pertemuan, konferensi dan pameran, acara-acara khusus, hiburan, rekreasi dan olah raga.

Di samping berbagai daya tarik yang telah disebutkan tadi, fasilitas-fasilitas penunjang aktivitas kepariwisataan juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Fasilitas wisatawan yang khas dan luar biasa juga dapat menjadi sumber daya tarik, misalnya hotel dan resort dengan desain yang indah. Model transportasi yang unik dan khas pun dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, makanan juga termasuk faktor yang tidak dapat ditinggalkan sebagai daya tarik. Ini terjadi bila makanan tersebut disajikan dengan sangat baik dan bercita rasa tinggi. Tidak itu saja, masih ada banyak faktor lainnya yang perlu diperhitungkan sebagai sumber daya tarik suatu destinasi, seperti asosiasi keagamaan, suku bangsa, dan nostalgia. Di luar faktor-faktor tersebut, stabilitas politik, kesehatan dan keselamatan publik turut menjadi pertimbangan bagi daya tarik wisatawan. Yang tidak kalah penting, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perjalanan juga menjadi faktor penting. (Soekadijo 2000)

2. Perencanaan pariwisata

Terkait dengan penjelasan Soekadijo, Yoeti (1997:2) mengatakan bahwa pariwisata bukanlah kegiatan yang dapat diwujudkan secara spontan karena terdapat sejumlah aspek yang eksistensinya dibutuhkan, dan perlu menjadi bahasan dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata, yaitu:

- a. Wisatawan: pengembangan pariwisata harus didahului dengan penelitian tentang karakteristik wisatawan yang diharapkan datang. Dari negara mana saja mereka datang, anak muda atau orang tua, pensiunan atau pegawai biasa, apa kesukaannya, dan pada musim apa saja mereka melakukan perjalanan.
- b. Pengangkutan: penelitian selanjutnya adalah bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia atau yang akan digunakan, baik untuk membawa wisatawan dari negara asal ke daerah tujuan wisata yang akan dituju. Selain itu, bagaimana pula transportasi lokal bila melakukan perjalanan wisata di daerah tujuan wisata yang dikunjungi.
- c. Atraksi/objek wisata: bagaimana objek dan atraksi yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat seperti: apa yang dapat dilihat (something to see) apa yang dapat dilakukan (something to do) apa yang dapat dibeli (something to buy), di daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi
- d. Fasilitas pelayanan: fasilitas apa saja yang tersedia di daerah tujuan wisata tersebut, bagaimana akomodasi, perhotelan, restoran, pelayanan umum seperti bank/money changer kantor pos, telepon, faksimili, internet, di daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi wisatawan.
- e. Informasi dan Promosi: calon wisatawan perlu memperoleh informasi tentang daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Untuk itu perlu dipikirkan cara-cara publikasi atau promosi yang

akan dilakukan. Iklan harus dipasang, ke mana leaflets/brosur harus disebar, sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata yang ada dan memudahkan calon wisatawan dalam mengambil keputusan.

Agar perkembangan pariwisata di suatu daerah dapat berjalan sesuai harapan, maka sudah sewajarnya para pembuat kebijakan yang bermaksud mengembangkan pariwisata di wilayah kerjanya harus melakukan serangkaian kegiatan perencanaan.

Pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (Ardika, 2002) :

1. Kegiatan pariwisata merupakan suatu kegiatan ekonomi yang relatif baru. Dengan demikian pemerintah dan pihak swasta memiliki informasi dan pengalaman yang terbatas tentang bagaimana mengembangkan sektor ini dengan baik. Perencanaan pariwisata dapat menjadi arahan dan pedoman dalam mengembangkannya.
2. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang sangat kompleks, multisektoral, dan melibatkan berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, manufakturing, kebudayaan, pertamanan, berbagai fasilitas pelayanan dan jasa, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Perencanaan dan koordinasi untuk memadukan unsur-unsur tersebut menjadi mutlak.

3. Pariwisata dapat mendatangkan keuntungan ekonomis baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan perencanaan yang baik, keuntungan ini dapat dioptimalkan.

Inskeep (1991:49) menjelaskan serangkaian tahapan yang harus ditempuh dalam proses perencanaan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Studi
- b. Penentuan Tujuan
- c. Survei
- d. Analisis dan Sintesis
- e. Formulasi Kebijakan dan Perencanaan
- f. Rekomendasi
- g. Implementasi dan Pengawasan. Ini merupakan tahap akhir dari seluruh proses perencanaan pengembangan pariwisata.

Tentang perencanaan, strategi pengelolaan, dan evaluasi pariwisata, Spillane (1987: 28) memaparkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan advocacy: pendekatan ini mendukung pariwisata dan menekankan keuntungan ekonomis dari pariwisata. Potensi pariwisata bisa dipakai untuk mendukung bermacam-macam kegiatan ekonomis, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperoleh devisa asing yang dibutuhkan bagi pembangunan. Perkembangan pendekatan

ini mencapai puncaknya pada tahun 1960-an dan terus menarik perhatian pengkaji dan pengembang pariwisata.

2. Pendekatan cautionary: karena pariwisata baru dipandang dari satu sisi saja, ada dorongan untuk memunculkan pendekatan lain yang kemudian dikenal sebagai pendekatan cautionary. Pendekatan ini muncul pada tahun 1970-an, baik yang mempertanyakan maupun yang menolak sama sekali pendekatan advocacy. Mereka yang berada pada sisi pendekatan cautionary menekankan bahwa pariwisata dapat menyebabkan banyak kerugian (disbenefits) dalam berbagai aspek sosio-ekonomi, seperti menimbulkan lapangan kerja musiman dan kasar (rendahan), mengakibatkan kebocoran devisa, komersialisasi budaya, serta menyebabkan berbagai macam konflik.
3. Pendekatan adaptacy: karena kedua pendekatan tersebut saling berlawanan, muncul bentuk pendekatan baru yang berpandangan bahwa pariwisata mempunyai unsur positif maupun negatif. Pendekatan Adaptacy menyebutkan bahwa pengaruh negatif pariwisata dapat dikontrol dengan mencari bentuk lain perkembangan pariwisata dari yang selama ini dikenal umum, atau dengan menyesuaikan pariwisata dengan kondisi di negara atau daerah tujuan wisata. Cara berpikir baru ini didasarkan pada pandangan bahwa alam dan budaya dapat digabungkan dalam satu konteks. Pendekatan ini mengusulkan strategi pembangunan pada skala kecil, pariwisata yang terkontrol, pariwisata yang dapat bertahan lama (Sustainable), pariwisata dengan cara menikmati kehidupan masyarakat setempat,

dan pariwisata yang berkaitan dengan ekologi (eco-tourism). Pendekatan ini membuat manusia sadar akan bahaya pariwisata massa (mass tourism). Karenaitu pendekatan ini mengusulkan beraneka ragam bentuk alternatif untuk mengembangkan pariwisata. Contohnya adalah agrowisata, community tourism, cottage tourism, rural tourism. Semua alternatif tersebut dikenal sebagai pendekatan developmental. Alternatif ini menganggap bahwa pariwisata dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat tuan rumah dan peka akan selera masyarakat tuan rumah.

4. Pendekatan knowledge based : pendekatan ini adalah pandangan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dengan memanfaatkan beberapa hal yang positif dan negatif dari semua pandangan di atas, pendekatan ini menggunakan pandangan sistematis terhadap pariwisata. Selain itu, pendekatan ini juga menganggap bahwa pariwisata adalah bidang penelitian yang multidisipliner dan cenderung menerapkan teori dan metode dari berbagai bidang yang berkaitan dengan pariwisata. Pendekatan ini menggabungkan beberapa bidang pengetahuan sebagai landasannya. Di samping itu, pendekatan ini tetap membuka diri terhadap ketiga pendekatan lainnya. Pendekatan knowledge based ini secara selektif menggabungkan ketiga pendekatan lain dengan masing-masing memberikan kontribusinya sendiri.

II.7. Kerangka Konseptual

Salah satu wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamujudalam membangun kota mamuju sebagai kota wisata, yaitu dengan menata dan mengelola obyek wisatanya. Pada Penataan dan Pengelolaan obyek wisata ini terdapat program yang ditargetkan pemerintah, salah satunya yaitu pembebasan lahan obyek wisata yang ada di Kabupaten Mamuju. Pada prinsipnya pembebasan lahan ini bertujuan untuk mempercepat konsep pembangunan kota wisata yang telah di canamkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan akan mempermudah pelaksanaan penataan dan pengelolaan obyek wisata yang ada di Kabupaten Mamuju, dimana dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan seluruh unsur yang terdapat di daerah, mulai dari unsur pemerintah, pihak konsultan maupun segenap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran program ini.

Efektivitas pelaksanaan penataan dan pengelolaan obyek wisata dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaannya dapat berperan dengan baik. Kesatupaduan unsur-unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelaksanaan program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju.

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju, maka penulis menggunakan pengukuran efektivitas yang dikemukakan

oleh Duncan (dalam Richard M. Steers; 1985:53) dimana terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu, pencapaian sasaran/target yang telah di tentukan.

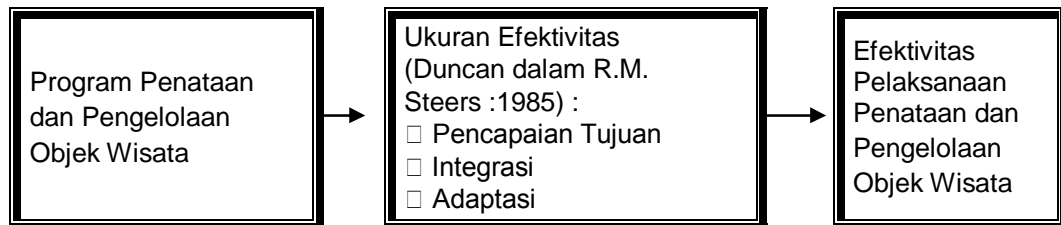
2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan manajemen untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Adapun pemaparan secara ringkas atas kerangka konseptual di atas, dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana tipe penelitian ini menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

III.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dan terjun langsung di Obyek Wisata yang akan diteliti.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini waktu yang digunakan untuk meneliti yaitu kurang lebih dua bulan.

III.3. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang ada di lokasi penelitian dan menjelaskan tentang efektivitas program penataan dan pengelolaan obyek wisata.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei yakni penelitian yang dilakukan dengan tujuan terjun langsung ke obyek penelitian guna meneliti terhadap permasalahan yang ada.

III.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan) yakni dilakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan bahan yang ada hubungannya dengan penyusunan skripsi ini.
2. Interview (wawancara) yaitu wawancara langsung dilakukan secara tatap muka dan bersifat terbuka terhadap responden baik secara formal maupun informal dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap beberapa masalah yang perlu diteliti.

III.5. Jenis dan Sumber Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan dokumen, bahan laporan atau catatan penting lainnya yang ada hubungannya dengan penyusunan skripsi ini.

2. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian melalui wawancara, kuesioner, dan observasi.

III.6. Narasumber atau Informan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan narasumber/informan untuk mengetahui data atau informasi tentang permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Adapun yang menjadi narasumber/informan dapat diperinci sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Dari Aparat Pemerintah | : Hj. Warliah Hamid M,Pd. |
| 2. Dinas Pariwisata | : Dra. Hj. Hapsah Wahid. |
| 3. Dinas Pendapatan Daerah | : Arianto AP. |
| 4. Pemerintah Desa / Kelurahan | : Mahmud Samad S,Pd. |
| 5. Pengusaha Sarana | : H. Muh. Amri Mustafa. |
| 6. Dari Wisatawan Domestik | : Muh. Hasbi |
| 7. Tokoh Masyarakat | : Bapak Kamaruddin |

III.7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, artinya data diperoleh dari dokumen berupa jawaban atau keterangan bukan berupa angka-angka.

Sedangkan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, dikelompokkan, atau diinterpretasikan berdasarkan sifat data dan kemudian diadakan interpretasi terhadap data yang didasarkan pada fakta serta didukung oleh pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang berbobot.

III.8. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan

pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini.

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju, maka penulis menggunakan pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Richard M. Steers; 1985:53) dimana terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu :

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

IV.1. Gambaran Umum Lokasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju terletak di Jalan Gatot Subroto No 01 Kabupaten Mamuju. Kabupaten mamuju merupakan salah satu Kabupaten Induk dari lima kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat yang mana Kabupaten Mamuju sebagai Kabupaten yang berfungsi sebagai Ibu Kota Provinsi yang terbentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 yang merupakan Provinsi termuda dari 33 Provinsi di Indonesia.

Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 801,406 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Majene, Mamasa, dan Kabupaten Tana Toraja
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

IV.2. Gambaran Demografi

Penduduk Kabupaten mamuju dengan jumlah penduduk sebanyak 336,973 jiwa (dengan komposisi laki-laki sebanyak 173,413 jiwa dan perempuan sebanyak 163,560 jiwa).

IV.3. Pengembangan dan Konsep pembangunan Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju

IV.3.1. Pengembangan Obyek Wisata

1. Pengembangan Obyek Wisata Alam (so'do) di Kabupaten Mamuju yang di Kembangkan Secara Kawasan

Pengembangan kawasan obyek wisata alam di Kabupaten Mamuju dalam hal ini melakukan pengelolaan obyek secara proporsional mengingat begitu banyaknya obyek wisata alam yang sangat mendukung program pembangunan pemerintahan, berdasarkan atas otonomi yang melakukan program pengembangan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan proses pengembangan tersebut, beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dalam mengembangkan obyek wisata secara proposional. Pengembangan obyek wisata alam di Kabupaten Mamuju selain ditunjang dari segi geografis wilayah obyek wisata tersebut, juga didukung agrobisnis hasil produksi perkebunan pertanian masyarakat yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat setempat seperti buah durian dan langsung.

Untuk itu dalam pengembangan tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pendapatan keuangan dan aset-aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan pembangunan obyek wisata pendukung.
- c. Pengembangan budaya pelestarian obyek wisata di obyek wisata sebagai pagelaran seni.
- d. Pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan keuangan dan pendapatan yang ditunjang dari kapasitas jumlah pengunjung.
- e. Pengelolaan pemeliharaan obyek wisata.
- f. Pengembangan kawasan pendukung yang bersifat keseluruhan.

2. Pengembangan Obyek Wisata Bahari (Pulau Karampuang)

Sebagaimana program pengembangan obyek wisata alam yang di jelaskan di atas, obyek wisata alam bahari secara pengembangan Pemerintah Kabupaten Mamuju juga melakukan pengembangan kawasan dengan konsep yang sama. Obyek wisata alam bahari yang dikembangkan secara berkesinambungan di kelola dengan fasilitas penghubung sebagaimana program ini Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam melakukan pengembangan obyek wisata tak lepas juga dari beberapa investor yang memberikan bantuan baik secara moral ataupun materil dalam pengembangan kawasan tersebut. Obyek wisata alam bahari dengan luas wilayah 3 Ha, dengan konsep pengembangan fasilitas hotel, restoran dan bungalo secara komersial sangat menunjang pengembangan salah satu obyek wisata di Kabupaten Mamuju.

Pengembangan obyek wisata alam bahari ini yang di tinjau secara geografis wilayah ditambah dengan penunjang lain secara konsep pemerintah menanamkan sebuah nilai investasi yang sangat menjanjikan dengan beberapa fasilitas obyek yang akan dikelola secara proporsional merupakan salah satu strategi baik yang perlu di beri ukungan dan support yang baik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dalam pengembangannya memberikan visi dan misi bahwa pengembangan kawasan bahari ini merupakan kawasan visi pengembangan lapangan pekerjaan dan merupakan salah satu icon kota yang memberikan ciri dan konsep sebuah wilayah.

Secara dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten Mamuju secara geografis yang merupakan kawasan pantai secara konsep pengembangan bahwa kawasan bahari dan pantai Sulawesi Barat sangat berpotensi dan sangat memberi nilai investasi yang luar biasa, sehingga dari salah satu misi pengembangan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat optimis dalam program pengembangan tersebut. Sehingga kota Sulawesi Barat yang berada di Kabupaten Mamuju secara berkesinambungan akan tetap mengembangkan Ibu Kota Mamuju sebagai konsep Kota Wisata ke dua dari bali tapi yang berada di sudut timur Indonesia. Berdasarkan ungkapan yang berkembang dan menjadi konsep pengembangan di Provinsi Sulawesi Barat, objek wisata bahari selain di kembangkan berasarkan kawasan perhatian dan sarana bantuan keluarga yang

penting dalam pengembangan kawasan bahari ini akan mendapatkan antara konsep fasilitas hotel dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

Sebagaimana yang dimaksud tentang pengembangan kebudayaan adalah bahwa nilai seni yang berkembang di Ibu Kota Provinsi yang melakukan secara budaya adalah tentang pagelaran seni tarinya, sehingga para turis yang berkunjung ke Sulawesi Barat nantinya akan banyak mendapatkan pemandangan pagelaran seni di gedung sebagaimana yang di buat dan di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Pagelaran seni budaya yang setiap minggunya di gelar di gedung serba guna yang di siapkan oleh pemerintah daerah setempat, merupakan wujud nyata bahwa pengembangan budaya tanah air sangat penting untuk di lestarikan mengingat nilai budaya yang di ciptakan secara turun temurun mencerminkan perilaku masyarakat mamuju yang mala'bi. Nilai kebudayaan menurut masyarakat mamuju sangat penting untuk di lestarikan mengingat kebudayaan yang terkandung di daerah ini sudah hampir punah, sehingga nilai kebudayaan yang ada di kembangkan menjadi nilai utama dan pokok dalam visi misi pengembangan konsep pariwisata dan pembangunan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat.

Pengembangan obyek wisata bahari yang merupakan visi misi yang penting juga adalah pembangunan obyek wisata pantai di antaranya pengembangan hotel, jembatan penghubung antara daratan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat dan Pulau Karampuang

yang merupakan sarana obyek wisata favorit masyarakat mamuju. Pengembangan fasilitas pantai wajib dan harus di anggarkan dalam pembuatan fasilitas pendukung mengingat fasilitas yang akan di berikan berdasarkan pengembangan fasilitas yang mengikuti konsep pengembangan fasilitas pantai. Sarana penghubung yang sangat besar dalam program pengembangan obyek wisata di pulau karampuang, pembangunan sarana penghubung berupa jembatan dengan konsep kota london menjadi salah satu ciri khas dari wajah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi mengenai fasilitas pengangkutan tourist berupa sarana perkapalan tetap dalam suatu konsep pendukung yang nantinya akan mewarnai ciri khas fasilitas yang dalam konsep pengembangan sehingga konsep pengembangan wisata bahari mamuju akan mencerminkan sebuah perpaduan antara konsep wisata negara cina dan london.

IV.3.2. Konsep Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata

1. Obyek Wisata Bahari (Pulau Karampuang)

- Pembangunan sarana perhotelan dan koteks/bungalo
- Pembangunan sarana restoran pantai
- Pembangunan sarana penghubung berupa jembatan yang menghubungkan kota mamuju dan pulau karampuang
- Pemfasilitasan sarana penghubung pengembangan tamu turis berupa kapal angkutan
- Pembangunan kawasan taman pantai dan fauna pantai

- Pemfasilitasan dan pengelolaan obyek wisata berupa banana boat, speed boat, dan perahu bebek
- Pembangunan dan penataan ulang sarana parkir pengunjung yang bersifat harian
- Pembangunan dan penataan tempat gedung seni budaya
- Penataan dan pengelolaan pasar seni budaya hasil home industri para pengrajin masyarakat setempat
- Pembangunan kantor keamanan pantai yang di pihak ketigakan oleh pemerintah setempat kepada perusahaan terkait yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

2. Obyek Wisata Alam (Permandian So'do)

- Pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata berupa villa alam
- Pembangunan rumah jamur berkonsep kebun
- Pembangunan jembatan gantung
- Penataan dan pengelolaan pasar seni alam dan pasar agribisnis
- Pembangunan kolam renang dewasa dan anak-anak
- Pembangunan dan pengelolaan sarana parkir pengunjung
- Penataan gedung seni budaya dan beberapa fasilitas wisata untuk kolam dan sungai
- Pemfasilitasan sarana arum jeram
- Pembangunan dan penataan ulang gasibu pondokan yang berkonsep minimalis modern

IV.4. Sasaran/Tujuan Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju.

Adapun sasaran/tujuan dari program penataan dan pengelolaan obyek wisata adalah sebagai berikut :

1. Pembebasan lahan/tanah obyek wisata alam dan bahari.
2. Pembuatan kolam renang yang di bagi menjadi dua yaitu anak-anak dan dewasa.
3. Pembangunan dan Penataan ulang gasibu yang telah rusak.
4. Pembangunan jembatan gantung.
5. Penataan pelataran parkir yang bersifat harian.
6. Penataan dan Pengelolaan pasar seni alam dan pasar agribisnis.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju mendapat anggaran langsung dari APBD untuk melaksanakan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di kabupaten mamuju sebesar Rp 3 Milyar. Berikut ini risalah kegiatan pembangunan penataan dan pengelolaan obyek wisata di kabupaten mamuju dengan menggunakan anggaran yang diperoleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Pembangunan penataan dan pengelolaan obyek wisata di kabupaten mamuju dengan dana yang di dapat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pembebasan lahan obyek wisata alam dan bahari	Rp. 1,7 Milyar
2	Pembuatan kolam renang anak-anak dan dewasa	Rp. 700.000.000
3	Pembangunan gasibu	Rp. 115.000.000
4	Pembangunan jembatan gantung	Rp. 325.000.000
5	Penataan pelataran parkir	Rp. 60.000.000
6	Penataan dan pengelolaan pasar seni alam dan pasar agribisnis	Rp. 100.000.000

Sumber : Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1. Efektivitas Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, maka adapun hasil penelitian yang didapatkan dapat digambarkan sebagai berikut:

Efektivitas program penataan dan pengelolaan obyek wisata dalam pembebasan lahan obyek wisata di Kabupaten Mamuju, dapat dilihat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), yaitu dengan melihat pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam pembahasan di bawah ini :

A. Pencapaian Tujuan

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan pencapaian sasaran/target yang telah ditentukan.

Dalam tujuan Pembebasan dan pencabutan hak atas tanah adalah dua acara dalam manahak atas tanah dari yang empunya menjadi dihapus, dan karena itu tanah yang dihakinya menjadi tanah negara bebas kemudian atas permohonan sesuatu pihak hak atas tanah itu diberikan oleh negara kepadanya. "Baik pencabutan maupun pembebasan hak atas tanah dilakukan apabila cara lain untuk memindahkan hak (jual-beli, tukar-menukar) tidak mungkin dilakukan, sedangkan si pihak yang memerlukan tanah atas pertimbangannya dan disetujui oleh instansi yang berwenang sangat memerlukan tanah tertentu.

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut Permendagri) No.15 Tahun 1975 ditegaskan bahwa, yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak/ penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Dan menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria No.Ba 12/ 108/ 12/ 75 tanggal 3-12-1975 perihal Pelaksanaan Pembebasan Tanah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan hak atas tanah adalah setiap perbuatan yang dimaksud langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang hukum/ penguasa, atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/ penguasa atas tanah itu. Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari pembebasan hak atas tanah itu adalah bahwa "setelah pihak yang memerlukan tanah membebaskan haknya dan pemegang hak telah melepaskan / menyerahkan haknya, tanah tersebut dapat dikuasai oleh pihak yang

membebaskan dengan sesuatu hak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya agar dapat dikuasai dengan hak guna bangunan, hak guna usaha.

Kepariwisata dikembangkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi mempunyai tujuan yang luas meliputi aspek sosial-budaya, politik dan hankamnas. Walaupun demikian tujuan ekonomis sangat menonjol, lagi pula aspek non ekonomis pembangunan pariwisata sangat erat terkait dengan tujuan ekonominya.

Secara spesifik pengembangan pariwisata diharapkan dapat memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendorong pembangunan daerah. Sektor pariwisata juga diharapkan sebagai lokomotif (penggerak) dan magnet (pemicu) dalam memperbaiki kondisi ekonomi.

1. Waktu Pelaksanaan.

Waktu pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju dilaksanakan dalam satu periode yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, program penataan dan pengelolaan obyek wisata dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan Sosialisasi, Musdes sosialisasi, tahapan verifikasi, tahapan penanggulangan dan penyelesaian korban akibat ganti rugi pembebasan tanah/lahan.

Pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju dilaksanakan melalui beberapa proses yaitu :

- a. Sosialisasi dimana pada tahapan ini dilakukan pengenalan awal pada masyarakat di sekitar lahan obyek wisata agar memahami adanya program penataan dan pengelolaan obyek wisata yang telah dicanamkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Sosialisasi ini memakan waktu selama 2 hari.
- b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi sebagai ajang penyebaran informasi mengenai adanya program penataan dan pengelolaan obyek wisata, tahapan ini memerlukan waktu 2 hari.
- c. Verifikasi yaitu adalah tahapan untuk menilai kelayakan usulan setiap warga masyarakat yang berada disekitar obyek wisata tentang apa-apa saja yang harus ditambahkan pemda setempat agar dapat membantu kelancaran program penataan dan pengelolaan obyek wisata yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan tahapan ini memakan waktu 3 hari.
- d. Tahapan penanggulangan dan penyelesaian korban akibat ganti rugi tanah/lahan yaitu untuk menghindari adanya keributan/konflik antara warga dan pemda setempat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, waktu pelaksanaan tahapan ini memakan waktu 3 bulan. Adapun tahapan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mengenai penyebab terjadinya korban akibat ganti rugi tanah/lahan dan penanggulangannya adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya korban dalam pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah/lahan.

Dalam pelaksanaan ganti rugi tanah/lahan selalu terjadi Victimisasi (pengorbanan) terhadap masyarakat, Korbannya masyarakat atas proses ganti rugi tanah miliknya terjadi karena :

- a. Permasalahan-permasalahan yang terlibat bahwa selalu terjadi cara-cara pelaksanaannya, tidak sabarnya panitia pembebasan tanah/lahan yang kadang kala berlebihan dari masyarakat dan sebagainya.
- b. Sering terjadinya pembebasan tanah/lahan secara liar dan keterlibatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- c. Dalam pembebasan tanah/lahan sering dilakukan intimidasi, tekanan dan pemanggilan-pemanggilan yang tidak wajar.
- d. Jaminan kepastian hak ataupun perlindungan kepada rakyat belumlah berkembang, lebih banyak hanya sebagai objek dari pada spekulasi dan tindakan untuk mempercepat proses.

Hak perorangan atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang hanya mengandung aspek perdata. Hak ini berisi kewenangan untuk menguasai dan menggunakan tanah secara individu dengan hak-hak yang bersifat pribadi. Menguasai dan menggunakan tanah secara individual berarti bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai secara perorangan. Tidak ada keharusan untuk menguasainya bersama-sama orang lain secara

kolektif, biarpun menguasai dan menggunakan tanah secara bersama dimungkinkan dan diperbolehkan.

Meskipun hak-hak perorangan itu memiliki kewenangan secara individual dan bersifat pribadi, namun di dalamnya terkandung unsur kebersamaan (kemasyarakatan). Itu jelas terlihat dalam pasal 6 UUPA yang berbunyi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Kewenangan untuk menguasai dan menggunakan tanah secara individual dan sifat pribadi dari hak-hak perorangan itu sendiri merupakan bukti bahwa hak-hak perorangan atas tanah merupakan hubungan hukum yang semata-mata beraspek perdata.

Dalam pelepasan atau penyerahan hak, kesepakatan mengenai ganti rugi dan kesediaan menyerahkan tanah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian ketidak sepakatan mengenai ganti rugi sama halnya dengan ketidak sempurnaan pelepasan atau penyerahan hak sebagai suatu tindakan hukum, tegasnya perbuatan itu belum sah secara hukum.

2. Penanggulangan dan penyelesaian korban dalam ganti rugi akibat pembebasan tanah/lahan.

Penanggulangan dan penyelesaian permasalahan korban dalam ganti rugi tanah/lahan bukanlah suatu yang mudah karena unsur-unsur sosial yang negatif dapat mempengaruhi orang melakukan perbuatan yang sukar untuk dirubah. Oleh sebab itu usaha

mengatasi permasalahan korban ganti rugi tanah/lahan harus konseptual dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan penganggulangan harus diusahakan adanya kesediaan dan semangat untuk bekerja sama, mengkoordinasi dan dikoordinasi, mengusahakan keterpaduan dalam berpandangan dan kegiatan memperhatikan kesederhanaan yang efektif untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memperlancar usaha.

Langkah yang harus diambil dalam usaha penanggulangannya dan menyelesaikan pelaksanaan ganti rugi agar tidak menimbulkan korban ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain :

a. Mengusahakan pemahaman masalah.

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pencegahan, penindakan dan penyelesaian suatu korban akibat ganti rugi tanah, maka harus memahaminya dengan tepat serta menganalisisnya, terutama faktor-faktor penghambat dan pendukungnya.

Yang harus dipahami terutama sebagai landasan adalah :

1. Individu-individu yang teribat dalam eksistensi suatu struktural. Dari individu-individu ini diperhatikan secara khusus mereka yang berpengaruh di lingkungannya (besar atau kecil), dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

2. Kemudian perlu dipahami situasi dan kondisi mereka yang menghambat atau mendukung mereka terlibat dalam suatu struktural serta cara mendekati mereka yang komunikatif persuasif dalam rangka usaha-usaha pencegahan (general dan special).
3. Usaha-usaha pencegahan, pembinaan dan pengawasan sosial dalam menghadapi korban struktural serta akibat, pengaruh efektifitasnya terhadap yang bersangkutan.
4. Hak dan kewajiban mereka yang terlibat dalam eksistensi suatu struktural.

b. Mengusahakan pencegahan struktural.

Dengan bekal pandangan, pemikiran yang tepat dikembangkan dan ditingkatkan usaha-usaha pencegahan Victimisasi Struktural. Usaha pencegahan harus lebih diutamakan, alasannya adalah :

1. Tindakan pencegahan adalah lebih sederhana dan baik daripada tindakan represi, koreksi, rehabilitasi dan sebagainya, sebabnya :
 - a. Tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi yang merupakan peluang penyalahgunaan kekuasaan.
 - b. Lebih ekonomis dengan usaha-usaha represi, koreksi dan rehabilitasi dapat dilakukan sendiri juga.

2. Tindakan pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif, sebabnya :
 - a. Tidak menimbulkan korban stigmatisasi, persaingan dan permusuhan.
 - b. Tidak menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban azasi seseorang (kecuali dalam usaha-usaha prevensi spesial).
3. Usaha-usaha pencegahan dapat mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan jika dilakukan bersama.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang waktu pelaksanaan yang dilakukan pemda setempat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dalam menangani permasalahan pembebasan status tanah/lahan obyek wisata dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pengusaha sarana yang menyatakan :

“waktu pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemda setempat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju sudah berjalan, namun masih ada permasalahan yang terjadi yaitu adanya korban tentang pembebasan tanah/lahan dikarenakan harga yang diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar obyek wisata bahari (pulau karampuang) itu jauh dari harga pasar pada umumnya, meskipun saya mengerti ini untuk kepentingan bersama dan memajukan kota mamuju nantinya. Tapi dilihat dari mata pencaharian masyarakat yang ada di obyek wisata bahari ini (pulau karampuang) sebagian besar sebagai nelayan, bahkan ada yang jadi buruh nelayan cuma ikut membantu nelayan yang ada. Jadi kalau pun di bebaskan lahannya nanti dan biaya pembebasan lahan yang akan diterima tidak sesuai dengan harga yang diminta oleh masyarakat setempat, maka akan sangat sulit untuk terjadinya kesepakatan antara warga dan pemda setempat. Jadi saya sangat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dan Dinas Pariwisata setempat dapat mengerti

keadaan masyarakat yang ada disini dan dapat menentukan harga yang pas untuk membayar ganti rugi/pembebasan lahan ini".
(Hasil wawancara tanggal 3 November 2012)

Hal serupa dinyatakan oleh tokoh masyarakat setempat yang berada disekitar obyek wisata bahari (Pulau Karampuang), Beliau menyatakan :

"Dalam waktu pelaksanaan pembebasan tanah/lahan yang dilakukan di obyek wisata bahari (Pulau Karampuang) bukannya masyarakat setempat tidak mau dibebaskan lahannya, masalahnya masyarakat yang berada disekitar obyek wisata bahari dari hasil mata pencahariannya sehari-hari masih belum cukup untuk menghidupi keluarganya, maka dari itu saya yang ditunjuk oleh masyarakat disini sebagai orang yang mewakili dari masyarakat setempat meminta kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju kalau ingin membebaskan lahan kami agar kiranya melihat harga pasar tentang harga tanah/lahan yang kami diami selama ini di sesuaikan dengan harga pasar yang ada jangan juga terlalu rendah tentang penawaran harga lahan kami meskipun saya tau maksud dan tujuan dari Pemerintah Daerah setempat sangat baik untuk daerah kita tapi saya sangat memohon kepada Pemerintah Daerah setempat agar kiranya dapat memenuhi permintaan dari warga masyarakat yang ada disini untuk memberikan harga yang pas dan sesuai dengan harga pasar yang ada sehingga tujuan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dapat memaksimalkan program yang telah dibuat".
(Hasil wawancara tanggal 3 November 2012)

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan ganti rugi tanah/lahan dan kaitannya dengan korban maka pembebasan tanah/lahan untuk kepentingan swasta(perusahaan) maupun pemerintah telah dilakukan, Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan perwakilan Aparat Pemerintah setempat beliau mengungkapkan :

"kami selaku dari Aparat Pemerintah Daerah Mamuju telah membuat program untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah di tugaskan oleh Gubernur tentang pembebasan lahan obyek wisata dan kami akan terus berusaha untuk mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada warga yang berada di sekitar obyek wisata. Warga pemilik lahan selalu disertakan dalam sosialisasi-sosialisasi. Dimana, dana

penggantian merupakan hasil hitungan yang disesuaikan dengan harga pasar dan keinginan warga. Dalam tahapan ini, sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan kepada warga tujuan dari pembangunan kota wisata yang telah di canamkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan berapa besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sejauh ini, pembebasan lahan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum mencapai target yang maksimal tapi sudah ada titik kesepakatan dengan warga masyarakat yang berada di obyek wisata alam Permandian So'do dan akan terealisasi pada bulan januari. Mengenai pembebasan lahan yang berada di obyek wisata bahari (Pulau Karampuang) kami masih terus berusaha melakukan pendekatan dengan warga setempat, masalah yang kami hadapi disana masyarakat di sekitar obyek wisata belum begitu paham dengan tujuan kami jadi kami masih terus berusaha untuk lebih sering mengadakan sosialisasi kepada warga disana agar dapat melaksanakan tugas kami dan dapat mewujudkan kota mamuju sebagai kota wisata nantinya”.

(Hasil wawancara tanggal 8 November 2012)

Dari beberapa hasil wawancara dari para informan maka dapat disimpulkan bahwa, waktu pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah teknis yang terjadi di lapangan masalah tersebut diantaranya, dalam hal pembebasan lahan/tanah yang ada di obyek wisata bahari (pulau karampuang) masyarakatnya belum paham betul tentang program yang telah dibuat oleh pemda setempat sehingga terjadi keterlambatan pembebasan lahan/tanah yang ada di obyek wisata bahari (pulau karampuang). Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju menyiasati dengan cara melaksanakan tahapan yang telah di uraikan sebelumnya diantaranya mengusahakan pemahaman masalah dan mengusahakan pencegahan struktural agar

program yang telah di laksanakan dapat tercapai secara maksimal selama kurun waktu yang telah ditentukan.

2. Sasaran / Tujuan

Efektivitas pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata dapat di lihat juga dari sejauh mana pelaksanaan program ini mencapai sasaran atau tujuannya. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya apabila suatu program tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya maka program tersebut tidak efektif.

Sasaran dari pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata ini adalah untuk membebaskan lahan obyek wisata alam dan bahari, Pembangunan kolam renang yang di bagi menjadi dua bagian yaitu anak-anak dan dewasa, pembangunan dan penataan ulang gasibu yang telah rusak, pembangunan jembatan gantung, Penataan pelataran parkir, Penataan dan Pengelolaan pasar seni alam dan pasar agribisnis.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju ini dapat dilihat dari apakah kegiatan penataan dan pengelolaan ini telah mencapai sasaran pembangunan yang telah ditentukan dan apakah sudah terlaksana dengan baik atau malah sebaliknya dan dapat dilihat juga dari apakah masing-masing pembangunan tersebut mengalami perubahan serta apakah hal tersebut dapat bermanfaat nantinya bagi

para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Mamuju atau tidak.

Adapun pencapaian sasaran/tujuan dari pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Pencapaian Sasaran/Tujuan dari Pelaksanaan Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju.

No	SASARAN YANG INGIN DICAPAI	REALITA	HARAPAN	KET
1	Pembebasan lahan/tanah obyek wisata Alam dan Bahari	Meskipun program ini di peruntukkan untuk dua obyek wisata tapi saat ini hanya satu yang berhasil mencapai kesepakatan yaitu obyek wisata alam sedangkan untuk obyek wisata bahari masih dilakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.	Diharapkan Pemda setempat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secepatnya.	Hasil ini dapat dikatakan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini salah satunya sudah tercapai.
2	Pembangunan kolam renang yang di bagi menjadi dua bagian yaitu anak-anak dan dewasa	Pembangunan ini sudah berjalan di obyek wisata alam kab. mamuju dan diharapkan	-	Hal tersebut sudah dapat dikatakan efektif

		nantinya akan bermanfaat bagi para pengunjung		
3	Pembangunan dan penataan ulang gasibu yang telah rusak	Kegiatan ini telah berjalan dan telah adanya perubahan yang nyata di obyek wisata kab. mamuju	Di harapkan nantinya akan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di kab. mamuju	Hasil ini sudah dikatakan efektif dengan adanya perubahan-perubahan yang ada
4	Pembangunan jembatan gantung.	Pembangunan ini belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan adanya hambatan biaya/dana untuk menyelesaikan pembangunan ini.	Diharapkan Pemda setempat dapat memberikan dana secepatnya agar pembangunan ini dapat terealisasi dengan baik.	Program pembangunan ini belum dikatakan efektif dikarenakan masih adanya hambatan mengenai biaya/dana untuk merealisasikan kegiatan tersebut
5	Penataan pelataran parkir yang bersifat harian	Telah adanya pelataran parkir yang tersedia	-	Hal ini sudah efektif
6	Penataan dan pengelolaan pasar seni dan pasar agribisnis	Telah tersedianya pasar yang dapat digunakan warga sekitar	Diharapkan dengan adanya pasar seni dan pasar agribisnis ini, para wisatawan dapat berbelanja souvenir hasil kerajinan warga setempat dan dapat menikmati buah-buahan yang dijual di pasar tersebut	Hal ini dapat dikatakan efektif

Sumber :Hasil olah data wawancara dan observasi

Hasil atau pencapaian sasaran/tujuan di kedua obyek wisata dapat di lihat dari observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk wisata bahari (Pulau Karampuang)

- Telah adanya perubahan tentang penataan atau perbaikan gasibu
- Penataan gedung seni
- Penataan dan pengelolaan pasar kerajinan

b. Untuk wisata alam (Permandian So'do)

- Pembebasan lahan obyek wisata telah terlaksana
- Penataan pelataran parkir
- Pembangunan, penataan dan pengelolaan gasibu yang telah rusak
- Pembangunan kolam renang anak-anak dan dewasa
- Pembangunan jembatan gantung
- Penataan dan pengelolaan pasar agribisnis

Beberapa hasil wawancara dengan beberapa Informan mengenai masalah sasaran/tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program ini Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, yang mengatakan bahwa :

“Sejauh ini kami terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan masalah ini tapi baru satu Obyek yang berhasil kami bebaskan lahannya yaitu Permandian so'do karena sudah ada kesepakatan dengan warga yang ada disana dan itu sudah ada dananya. Jadi nanti bulan januari kami bayarkan biaya pembebasan lahannya sekalian di lanjutkan dengan penataan dan pengelolaan yang telah di programkan tapi masih banyak juga kendalanya sekarang karena Obyek Wisata yang ada di Pulau Karampuang belum di bebaskan juga lahannya jadi masih terkendala juga dengan biayanya untuk sementara ini Pihak Dinas Pariwisata Mamuju hanya melakukan perbaikan-perbaikan gasibu yang ada di

permandian so'do dan terus berusaha melakukan penyelesaian yang ada di Pulau Karampuang mengenai pembebasan lahan dan penataannya”.

(Hasil wawancara tanggal 8 November 2012)

Selanjutnya sesuai dengan pendapat responden tentang Program Penataan dan Pengelolaan yang ada di obyek wisata Kabupaten Mamuju dapat di lihat dari hasil wawancara dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan yang menyatakan :

“Sarana sanitasi yang ada disekitar obyek wisata di Kabupaten Mamuju memang saat ini sudah cukup memadai tapi alangkah baiknya apabila sarana sanitasi yang telah ada dapat dikembangkan lagi atau ditata dan dikelola ulang dikarenakan sudah ada beberapa sarana sanitasi yang telah rusak dan perlu perbaikan lagi. Sejauh ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju sudah mulai melakukan perbaikan-perbaikan sarana sanitasi yang telah rusak dan penataan ulang sarana-sarana yang telah ada agar apat dikelola dengan baik dan semoga kedepannya nanti akan lebih baik lagi mengingat potensi yang dimiliki obyek wisata alam Mamuju sangat bagus untuk dikembangkan dan nantinya akan dapat lebih banyak menarik para wisatawan yang akan berkunjung ke wisata alam permandian so'do”

(Hasil wawancara tanggal 16 November 2012)

Hal ini senada dengan hasil wawancara dari salah satu karyawan yang bekreja di Pemerintah Desa/Kelurahan setempat yang menyatakan :

“Ya memang saat ini sarana sanitasi yang tersedia sudah cukup membantu bagi para wisatawan yang berkunjung untuk menikmati ataupun hanya untuk melihat pemandangan yang ada di tempat wisata ini dek, saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sudah mulai membuat kolam renang yang akan digunakan oleh anak-anak dan orang dewasa dan menata ulang pelataran parkir bagi para pengunjung agar nantinya obyek wisata kita ini akan terlihat lebih baik lagi dan dikelola dengan lebih baik lagi nantinya. Belakangan juga ini yang saya ketahui, akan adanya perbaikan jembatan gantung yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata agar akses transportasi menuju permandian so'do' lebih aman lagi untuk dilalui kendaraan karena selama ini jembatan yang sudah ada butuh pelebaran lagi karena

sekarang ini setiap kendaraan yang melintas harus antri di karenakan jembatan yang ada masih sempit atau belum cukup luas. Jadi kami disini juga terus membantu Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju untuk melakukan penataan dan pengelolaan obyek wisata ini sehingga nantinya akan lebih banyak lagi para wisatawan yang akan berkunjung.”

(Hasil wawancara tanggal 16 November 2012)

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju telah bekerja dengan baik dalam menangani status tanah/lahan yang menjadi problem selama ini. Namun masih belum maksimal, hal ini terjadi bukan hanya karena masyarakat yang berada disekitar obyek wisata belum sepenuhnya memahami pentingnya tentang pembangunan kota wisata yang akan dibangun dan dikembangkan. Tapi hal ini juga terkendala dengan besarnya biaya yang akan dibutuhkan dalam melakukan program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan pegawai dari Dinas Pendapatan Daerah. Beliau mengatakan :

“Memang pada dasarnya pembangunan kota wisata yang telah dicanamkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Barat penting bagi Ibu Kota Mamuju secara kita ini sebagai Provinsi yang masih muda dan gencar dalam aspek pembangunannya. Selain itu dari aspek pariwisata memang sangat membantu untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju. Tapi perlu kita ketahui untuk melaksanakan itu semua tidak langsung bisa terealisasi dengan cepat contohnya seperti yang adek teliti sekarang dari usaha Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam melakukan pembebasan lahan pariwisata menunjukkan bahwa belum sepenuhnya bisa terealisasi, itu dikarenakan biaya yang kita perlukan untuk menangani hal tersebut sangatlah besar dan belum lagi masalah masyarakat di sekitar obyek wisata bahari (pulau karampuang) belum terlalu paham maksud dan tujuan Pemerintah Daerah dalam program pembangunan kota wisata yang akan dilakukan. Namun dari beberapa bulan terakhir Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus mengadakan pendekatan dan musyawarah bersama untuk lebih meyakinkan lagi masyarakat yang ada disekitar

obyek wisata demi dapat terlaksananya program yang nantinya akan dapat terealisasi menjadikan Ibu Kota Mamuju sebagai kota wisata".
(Hasil wawancara tanggal 19 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sasaran/tujuan Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Mamuju ini dapat dikatakan belum berhasil secara optimal, hal itu dikarenakan dengan adanya kendala-kendala yang harus dihadapi salah satunya terkendala dengan dana/biaya yang dipakai untuk mengoptimalkan program ini. Tetapi selain itu, dibalik ketidakberhasilan sasaran program penataan dan pengelolaan tersebut terdapat pula keberhasilan dari adanya program penataan dan pengelolaan, dimana hal itu dapat ditunjukkan dari adanya pembuktian bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju telah berusaha untuk mewujudkan harapan masyarakat kabupaten mamuju untuk adanya perubahan dalam sektor pariwisatanya dan telah bekerja keras untuk menyelesaikan problem yang telah bertahun-tahun tidak ada ujung penyelesaiannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah daerah setempat terbukti telah menjalankan program penataan dan pengelolaan dengan baik dengan tercapainya sasaran/tujuan pembebasan lahan obyek wisata yang ada di obyek wisata alam (permandian so'do) dan telah berlangsungnya pembangunan Kolam Renang yang telah dibuat serta adanya perbaikan gasibu yang telah rusak sehingga nantinya dapat lebih menarik para

wisatawan yang berkunjung untuk menikmati pesona pariwisata yang ada di Kabupaten Mamuju.

B. Integrasi

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu manajemen untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat setempat yang ada disekitar obyek wisata. Dalam penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat kemampuan aparatur untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju. Untuk mengukur keberhasilan dalam proses sosialisasi dapat diukur atau dilihat dari bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju kepada masyarakat dan seberapa jauh masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang didapat dari sosialisasi tersebut apakah mereka memahami/mengerti atau bahkan sebaliknya. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola yang terkait dalam pelaksanaan Promosi mengenai pendukung obyek wisata di Kabupaten Mamuju yakni sebagai berikut :

Proses sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses pengenalan Promosi Pariwisata dalam usaha adanya pendukung/pendorong yang akan di lakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju untuk mewujudkan sektor pariwisata mamuju dapat berkembang

dan bersaing dengan tempat wisata yang ada di Indonesia serta berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana untuk melakukan proses sosialisasi mengenai program, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana program, agar apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian informasi tentang program juga harus dilakukan antara pelaksana program kebijakan dengan *target group* dalam hal ini adalah masyarakat.

Proses penyampaian informasi atau sosialisasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana program ini menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan program yang bersangkutan.

Adapun hal yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju mengenai pendukung obyek wisata adalah sebagai berikut :

a. Adanya petunjuk-petunjuk/pedoman-pedoman dari Pemerintah.

Dengan adanya petunjuk/pedoman dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Mamuju, sehingga pembangunan dan pengembangan penataan dan pengelolaan pariwisata dari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, karena didorong oleh perkembangan teknologi perhubungan serta adanya promosi yang dilaksanakan/digalakkan oleh pemerintah melalui promosi/publitas

pariwisata. Dan yang lebih penting lagi karena Kabupaten Mamuju sendiri memiliki daya tarik sebagai daerah tujuan wisata dengan mempunyai keunikan tersendiri dari budaya dan masyarakatnya.

Dari keseluruhan ini terlaksana dengan baik berkat adanya petunjuk-petunjuk/pedoman dari pemerintah untuk mengembangkan penataan obyek wisata dan pengelolaannya dan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Daerah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat tepatnya Ibu Kota Mamuju.

b. Promosi dan pusat informasi pariwisata.

Promosi pariwisata Kabupaten Mamuju yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yaitu mewujudkan Kota Mamuju sebagai primadona Daerah Tujuan Wisata di Sulawesi Barat, sesungguhnya baru dilakukan secara berencana dan terarah dalam beberapa tahun terakhir ini.

Penggalakan promosi dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dengan pihak Swasta pengelola usaha pariwisata utamanya dalam bidang Biro Perjalanan Umum.

Sebagai dampak positif dari kegiatan promosi dan publitas pariwisata tersebut maka arus wisatawan ke Kabupaten Mamuju secara perlahan dan kedepannya nanti tetap meyakinkan akan bertambah terus. Mengalirnya wisatawan baik mancanegara maupun nusantara ke Daerah Provinsi Sulawesi Barat khususnya Ibu Kota

Mamuju dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan dapat membantu Penghasilan Asli Daerah (PAD) ke depannya.

Adapun kegiatan promosi dan publitas pariwisata sebagai pendorong/pendukung program penataan dan pengelolaan obyek wisata yang dilakukan adalah :

- a. Bekerja sama dengan pihak swasta yaitu kepada semua pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata menerbitkan bahan promosi dan publitas pariwisata berupa brosur, leaflet, dan booklet.
- b. Bekerja sama dengan pakar budaya Mamuju menerbitkan buku tentang makna dan sejarah dari Kota Mamuju.
- c. Memanfaatkan pekan budaya Sulawesi Barat untuk mempromosikan.
- d. Bekerja sama dengan pemerintah dengan pengelola obyek untuk pengadaan telepon umum setiap obyek wisata yang belum terjangkau dengan sinyal telepon seluler.
- e. Banyaknya jenis dan jumlah obyek wisata yang bisa dikembangkan untuk menarik para wisatawan.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya mengenai pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan di Mamuju dapat dilihat dari hasil wawancara dari Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa :

“Proses penyampaian informasi mengenai program penataan dan pengelolaan obyek wisata mengenai adanya program promosi dan publitas sebagai pendorong/pendukung yang telah ada dijelaskan dengan

adanya pedoman-pedoman dari pemerintah. Sedangkan tata cara pelaksanaan program juga tertuang dalam pedoman-pedoman yang telah diberikan oleh pemda setempat.”

(Hasil wawancara tanggal 21 November 2012)

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh perwakilan Aparat Pemerintah setempat bahwa:

“Sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan program dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta yaitu kepada semua pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata menerbitkan bahan promosi dan publitas pariwisata berupa brosur, leaflet, dan booklet, dimana para petugas yang akan melaksanakan program dibekali dengan beberapa pengetahuan tentang tujuan dan tata cara pelaksanaan program ini.”

(Hasil wawancara tanggal 21 November 2012)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta yaitu kepada semua pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata menerbitkan bahan promosi dan publitas pariwisata berupa sosialisasi, brosur, leaflet, dan booklet serta tata cara pelaksanaan program dituangkan dalam pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh pemda setempat.

Selain proses sosialisasi dari pembuat kebijakan dengan pelaksana program seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dari pelaksana program kepada *target group* atau masyarakat khususnya masyarakat yang ada disekitar obyek wisata kabupaten mamuju. Agar anggota masyarakat yang dimaksud mengerti tentang sasaran ataupun manfaat dari program tersebut. Adapun pada program promosi dan publitas mengenai isi dan tujuan dari program

ini kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada disekitar obyek wisata, dilakukan melalui proses sosialisasi.

Selanjutnya mengenai proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemda setempat dapat dilihat dari pernyataan Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju yang menyatakan :

“Proses penyampaian informasi kepada masyarakat sudah dilakukan melalui beberapa proses sosialisasi, misalnya melalui penyebaran pamflet-pamflet, bahkan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui forum Sosialisasi dan Musdes Sosialisasi.”

(Hasil wawancara tanggal 21 November 2012)

Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu pegawai yang bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju yaitu :

“sosialisasi berjalan terus menerus, karena ketika ada program yang sosialisanya terbatas maka kegagalan mudah terjadi. Adapun proses sosialisasi dilakukan pada`tahapan musyawarah antar desa sosialisasi dan pada tahapan musyawarah desa sosialisasi.”

(Hasil wawancara tanggal 21 November 2012)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu Ibu yang mengetahui adanya program penataan dan pengelolaan obyek wisata, bahwa :

“Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata ini saya ketahui melalui pamflet-pamflet yang dipasang di beberapa tempat di desa saya. Oleh karena itu, saya bisa mengetahui bahwa ada suatu program yang sedang berjalan dan saya ingin tahu sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemda”.

(Hasil wawancara tanggal 21 November 2012)

Hal serupa juga dibenarkan oleh Ibu yang juga mengetahui program ini, bahwa :

“Program ini saya tahu dari papan baliho yang terpajang dipinggir jalan, kemudian saya konfirmasi ke salah satu keluarga yang bekerja dikantor

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dan dia menjelaskan lebih rinci tentang sasaran/tujuan dari program ini”.

(Hasil wawancara tanggal 21 November 2012)

Dapat diketahui bahwa sosialisasi atau proses penyampaian informasi dari pelaksana ke masyarakat khususnya masyarakat yang ada disekitar obyek wisata mamuju yaitu melalui sosialisasi dengan berbagai media seperti, brosur, leaflet, dan booklet, bahkan sosialisasi langsung ke masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang memperlihatkan pengetahuan masyarakat akan adanya program ini di Kabupaten Mamuju maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat program tersebut dari pelaksana kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal.

C. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu/masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur pembangunan sarana sanitasi sekitar obyek wisata dengan mengadakan pembangunan pasar agribisnis ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar obyek wisata untuk dapat meningkatkan penghasilan tambahan diantaranya berupa penjualan hasil perkebunan mereka kepada para wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut. Dalam penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dengan melakukan pembangunan sarana sanitasi sekitar obyek wisata.

Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai salah satu Kabupaten yang mulai berusaha menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata. Peningkatan pendapatan di sektor pariwisata berjalan melalui kunjungan wisatawan ke obyek wisata sehingga memberikan sumbangan retribusi obyek wisata dan nantinya akan memberikan sumbangan/pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju itu sendiri. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan posisi yang lebih baik untuk pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sehingga dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan anggaran pembangunan Kabupaten Mamuju.

Pembangunan sarana sanitasi di sekitar obyek wisata adalah merupakan suatu program yang telah di programkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada para wisatawan serta memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan membantu pendapatan masyarakat yang ada disekitar obyek wisata tersebut dengan menjajakan hasil perkebunan dari masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang wisatawan, yang mengatakan bahwa :

“Mengenai program pembangunan sarana sanitasi yang ada disini, sekarang ini yang saya lihat diobyek wisata ini sudah ada perubahan yang dilakukan, yang saya lihat gasibu yang ada sekarang sudah mulai tertata dan dikelola dengan baik sehingga saya merasa sudah nyaman dengan adanya perubahan seperti ini untuk lebih dapat menikmati pemandangan alam yang ada serta kolam renang yang telah dibangun sudah mencapai tahap penyelesaian. Pembangunan pasar agribisnis yang dibangun juga sudah mulai ditata dengan adanya pasar ini saya dan para wisatawan lain merasa sangat nyaman selain menikmati pemandangan kami juga dapat menikmati buah-buahan hasil perkebunan masyarakat sekitar yang diajakan kepada kami sehingga program ini sangat berpengaruh besar untuk masyarakat sekitar guna meningkatkan penghasilan mereka dan juga dapat menarik lebih banyak para wisatawan yang akan berkunjung ke obyek wisata ini”.

(Hasil wawancara tanggal 30 November 2012)

Selanjutnya pernyataan dari Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang menyatakan :

“secara umum sarana sanitasi yang ada di obyek wisata ini sudah sangat memadai, dengan melihat perubahan-perubahan yang telah ada dan diharapkan kedepannya akan lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Mamuju”.

(Hasil wawancara 30 November 2012)

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, yang menyatakan bahwa :

“menurut saya Program Penataan dan Pengelolaan Obyek Wisata ini telah terlaksana dengan baik, meskipun masih ada kendala yang kami hadapi mengenai masalah dana untuk melengkapi sarana/sanitasi ataupun masalah pembangunan yang belum rampung. Tetapi kami selaku pelaksana dari program tersebut akan terus berusaha dan bekerja dengan optimal dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan lebih banyak dan membantu masyarakat setempat dengan menyediakan pasar agribisnis

dan dijadikan sebagai lahan untuk menjajakan hasil perkebunan yang mereka miliki”.

(Hasil wawancara tanggal 30 November 2012)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara umum program ini telah membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan mereka dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana jumlah pengunjung setiap minggunya bertambah. Hal ini sangat berdampak positif dalam pelaksanaan program yang telah dilakukan.

Tabel 3. Tabel Efektivitas program penataan dan pengelolaan obyek wisata di Kab. Mamuju

No	Ukuran Efektivitas	Kegiatan/Tujuan	Keterangan
1	Pencapaian tujuan terdiridari 2 bagian : a. Waktu pelaksanaan b. Pencapaian sasaran/target	a. Waktu pelaksanaan dilakukan dalam beberapa proses yaitu : Sosialisasi, Musdes, Verifikasi, Tahapan penyelesaian korban ganti rugi lahan. Tujuan dari kegiatan ini agar tidak ada kendala yang akan dihadapi dalam menjalankan program yang telah direncanakan b. Pencapaian sasaran/target. Tujuan dari kegiatan ini adalah lebih mengacu pada penataan dan pengelolaan obyek wisata yang dilakukan agar nantinya dapat menarik lebih banyak wisatawan yang akan berkunjung	Kegiatan tersebut dapat disimpulkan cukup efektif dengan melihat telah adanya perubahan yang terjadi sekitar obyek wisata
2	Integrasi	Kegiatan yang dilakukan yaitu : Adanya petunjuk/pedoman dari pemda setempat, promosi dan pusat informasi pariwisata. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih menekankan pada tingkat kemampuan aparatur dalam mengadakan sosialisasi dan telah	Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah berjalan efektif namun belum

		terbukti bahwa program sosialisasi ini berjalan dengan baik dengan melihat hasil yang dicapai diantaranya yaitu telah tercapainya pembebasan lahan obyek wisata alam yaitu Permandian So'do.	optimal melihat status lahan yang ada di Pulau Karampuang belum mencapai kesepakatan dengan warga sekitar
3	Adaptasi	Kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan sarana sanitasi disekitar obyek wisata diantaranya : Pasar agribisnis, pembangunan gedung seni, pembangunan pasar kerajinan, Tujuannya untuk membantu masyarakat sekitar agar mendapatkan keuntungan dari adanya pasar agribisnis dan pasar kerajinan yang dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat dari hasil kerajinan tangan dan penjualan buah-buahan dari hasil perkebunan masyarakat setempat. Untuk menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung dan secara tidak langsung akan membantu Pendapatan Asli Daerah dan telah terbukti dengan adanya peningkatan wisatawan setiap minggunya yang berkunjung.	Kegiatan dan tujuan yang telah dilakukan sudah efektif dengan melihat dari pencapaian yang telah berjalan.

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penataan dan pengelolaan obyek wisata yang ada di Mamuju yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju telah berjalan dengan efektif namun belum maksimal dengan melihat hasil-hasil yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Status tanah yang menjadi faktor utama dalam pengembangan obyek wisata alam dan bahari di Kabupaten Mamuju merupakan hal yang sangat penting dan utama yang harus diselesaikan. Mengingat untuk mengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Mamuju, jika status tanahnya telah menjadi Aset/Inventaris daerah, maka pengelolaan itu secara langsung akan dapat dikelola secara proporsional meskipun saat ini hanya obyek wisata alamnya saja yang telah berhasil dimiliki dan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengenai hal ini akan mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam mengelola obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Mamuju diantaranya pembangunan kolam renang dengan dua kategori anak-anak dan dewasa, pembangunan gedung seni, pembangunan pasar agribisnis, pembangunan villa dan rumah jamur yang berkonsep kebun, pembangunan dan penataan ulang pelataran parkir bagi para

pengunjung/wisatawan, pembangunan dan perbaikan jembatan gantung. Berbicara tentang fasilitas pendukung dalam konteks pengelolaan obyek wisata sangatlah penting karena fasilitas pariwisata merupakan inventaris nyata dan menjadikan suatu nilai investasi setiap bulannya mengalami peningkatan selain itu dampak lain terhadap masyarakat dapat meningkatkan penghasilan yang diperoleh setiap minggunya akan meningkat dari hasil kebun yang mereka jajakan.

VI.2. Saran-saran

1. Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dapat menuntaskan status tanah/lahan wisata bahari (pulau karampuang) agar kedepannya dapat langsung ditata dan dikelola dengan lebih baik lagi.
2. Disarankan kepada warga masyarakat yang berada dilahan obyek wisata bahari (pulau karampuang) turut membantu Pemerintah Daerah setempat untuk lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan Pemerintah Daerah untuk membangun kota mamuju sebagai kota wisata.
3. Agar sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kepariwisataan terutama pada obyek wisata Alam (permandian so'do) mamuju lebih ditingkatkan mutu dan kualitasnya agar para wisatawan yang berkunjung merasa nyaman dan lebih menikmati pemandangan alam yang telah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hari Karyono. 1997. *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo.
- Ardika, IG. *Otonomi dan Pengembangan Pariwisata*. Diperoleh dari <[http://www. Equator online.com](http://www.Equatoronline.com). 2002.
- A, Yoeti, Oka. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung : Angkasa
- Burkart, A.J. dan Medlik, S. 1987. *Tourism, Past, Present, and Future*. London.
- Dardak H. 2005. Revitalisasi Penataan Ruang untuk Mewujudkan Ruang Nusantara yang Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Di dalam: Pattimura L, editor. *Penataan Ruang untuk Kesejahteraan Masyarakat: Khazanah Pemikiran Para Pakar, Birokrat, dan Praktisi*. Edisi Pertama. Jakarta: LKSPI Press.
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hadayaninrat Soerwarno. 1994. *Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Harsoyo, S. 1997. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik, Peradaban*.
- _____. 1977. *Pengertian Pengelolaan*. [Online]. Tersedia: [http://id.shvoong. com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/\[28-12-2012](http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/[28-12-2012)
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning, An Integrated and Sustainable Development Approach*.
- Kurniawan Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Martini dan Lubis 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Mazmanian Daniel. Paul Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, London : Scott, Foresman and Company.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process : A conceptual* dalam *Administration Society* 6, 1975, London : Sage.

- Mohammad Ali, 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Jakarta : Intima.
- Nurdin, Syafruddin dan Basyirudin Usman. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta : Ciputat Press
- Permana RDD. 2004. Rencana Pemanfaatan Ruang Jabodetabek-Punjur. Di dalam: Prosiding Seminar Terbatas Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Permasalahan Lingkungan di Jabotabek2004. Bogor: Swara Darmaga-Fakultas Pertanian IPB
- Rustiadi, Ernani, et al. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan YOI.
- Siagian, Sondang P. Prof. Dr. M.P.A. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 1978. *Peranan staf dalam manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Soekadijo. 2000. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Spillane, James J, SJ. 1987. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius, Yogyakarta.
- Steers, Ricard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugandhy A. 1999. *Penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
- Wahab, S. 1996. *Manajemen Kepariwisata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- (<http://server1.myservermatrix.com>)